

MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN PEASANT

Oleh : Ida Bagus Sedhawa.

ABSTRACT

Poverty should be a basis on the peasant to rise themselves in overcoming their problems. They must be adaptable on the innovation, such as entrepreneurship aspect. Developing entrepreneurship one is very useful for their welfare so that they might not be marginalized anymore. This constitutes as new paradigm in agricultural development, that is, agribusiness orientation. The efforts of peasant in using agricultural inputs should be appropriate and addressed to agribusiness orientation and use low external inputs.

Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang terencana & berkelanjutan melalui suatu tahapan proses formulasi, kebijakan dan implementasi. Apabila dikaitkan dengan tahapan-tahapan itu tampaknya pembangunan sektor pertanian di Indonesia belum terintegrasi dengan tahapan proses yang seharusnya. Pada sisi lain petani sebagai faktor produksi, khususnya *peasant*, adalah sosok petani yang berangkat dari berbagai kekurangan atau keterbatasan, kelemahan bidang inovasi, tidak berorientasi pada pasar, belum memanfaatkan teknologi, serta terikat pada pemilik tanah atau dengan kata lain adalah para petani yang belum terbangun adalah jiwa wirausahanya. Kondisi inilah yang menyebabkan *peasant* masuk pada kategori masyarakat miskin yang perlu dihentikan dalam pembangunan.

Kebijakan pemerintah di sektor pertanian tanpa melalui langkah-langkah formulasi dan dalam implementasinya sering menyesatkan para petani, seperti halnya kebijakan pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras seperti ini akan memberikan angin segar kepada para petani padi akan meningkatnya kesejahteraan mereka, namun apakah kita dapat mencermati bagaimana implementasinya di lapangan?. Pertanyaan ini tentu tidak mengherankan, karena berbagai kebijakan pernah digelontorkan oleh pemerintah atas keberpihakkannya terhadap kaum tani khususnya *peasant* tetapi nyatanya nasib *peasant* tak banyak mengalami perubahan, serta predikat sebagai kaum miskin tetap setia menemaninya.

Apabila kita mencermati implementasinya, HPP gabah maupun beras dikaitkan dengan sebagian besar para petani kita yang berstatus *peasant* dengan salah satu cirinya seperti : lahan garapan di bawah 0,50 hektar, dimana ada kecenderungan *peasant* menjual gabahnya secara langsung kepara tengkulak, dan hal ini terjadi karena tak didukung pembiayaan yang memadai dan biaya pengeluaran naik, adanya pengaruh inflasi, kecenderungan bertani untuk dimakan sendiri, dan *peasant* sebagian besar belum terlembaga. Dalam kondisi seperti itu, akankah kebijakan HPP gabah maupun beras mampu bisa mengangkat harkat/derajat *peasant* dari kondisi keterpinggiran ekonomi. Pencitraan *peasant* seperti itu ada indikasi menyebabkan para generasi muda akhirnya kurang tertarik melanjutkan profesi orang tuanya dimana pada satu sisi menyandang predikat luhur, namun pada sisi lain ternyata menyandang satu predikat, masyarakat miskin.

Kendatipun sampai saat sekarang ini, keberpihakan terhadap *peasant* belum mampu mengangkat citra pertanian di Indonesia, namun *peasant* perlu dibangun kebesaran diri karena negara industri sekalipun masih tetap menghormati para petaninya, karena dari jerih payah merekalah kebutuhan pangan manusia dapat dipenuhi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki citra pertanian yang menyasar para *peasant*nya senantiasa menjadi target politik penguasa atau yang mau berkuasa, dan bahkan mencanangkan dalam visi pembangunan pertanian agar mampu menjadi sektor ekonomi yang modern, tangguh dan efisien, serta berwawasan ke masa depan.

Menurut Rostow dalam Budiman (1996 :25-28), mengemukakan bahwasannya proses pembangunan dalam sebuah masyarakat adalah proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Dari pandangan Rostow di atas, bahwa membangun jiwa kewirausahaan pada peasant sesungguhnya adalah menanamkan nilai-nilai kemajuan pada bidang ekonomi dalam bertani menuju pola bertani agribisnis, yaitu membangun jiwa bertani dengan berorientasi pada kebutuhan pasar, berkelanjutan, dan berorientasi ke masa depan.

Dalam konteks tulisan ini, membangun kewirausahaan peasant dimaksudkan untuk menjawab paradigma baru pembangunan pertanian dengan mewujudkan pertanian modern, efisien, tangguh, berkelanjutan, maupun berorientasi ke masa depan, serta berdimensi ekonomis (mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tani atau peasant), memenuhi dimensi ekologis (tidak merusak lingkungan), dan memenuhi dimensi budaya (tidak merusak atau menghilangkan budaya daerah atau kearifan lokal). Menurut Dewa Ngurah Suprpta (2005: 71) untuk, mendukung ketiga dimensi di atas diperlukan *political will* dari pihak pemerintah.

Formulasi

Terdapat sejumlah penelitian tentang kelompok, khususnya terkait kelompok sosial tradisional di Bali, antara lain Suyatna (1982 : I-2) dalam disertasinya diungkapkan bahwasanya manfaat suatu kelompok dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi, tetapi perlu diadakan penelitian yang lebih lagi mendalam tentang dinamika kelompok-kelompok sosial tradisional yang telah ada dalam menunjang program-program pembangunan. Pandangan Suyatna tersebut tadi menunjukkan bahwa keberadaan kelompok sosial tradisional yang sudah ada di Bali seperti halnya *banjar*, *subak*, maupun *sekaa-sekaa* tani lainnya tetap penting guna menunjang kehidupan sosial religius masyarakat Bali, apalagi bisa dibuktikan bahwa dinamikanya masih terkait dengan kebutuhan pembangunan. Lebih lanjut, Suyatna menyatakan bahwa kelompok yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah sekadar kumpulan orang-orang. Hare (1962)

(dalam Suyatna, 1982:5) menunjukkan lima sifat yang membedakan kelompok dengan hanya sekadar kumpulan orang. Hare membedakan antara kelompok kecil (*small group*) seperti ikatan kekerabatan ataupun keluarga dengan kelompok yang besar (*large group*) seperti masyarakat. Kelompok kecil menurut Hare mempunyai keanggotaan 2 sampai 20 orang. Kelompok dengan jumlah anggota yang lebih banyak juga masih dapat dikategorikan sebagai kelompok kecil, asalkan interaksi tatap muka sering terjadi di antara anggota kelompok. Adapun ciri-ciri suatu kelompok kecil adalah seperti berikut ini.

1. para anggota selalu mengadakan hubungan tatap muka secara berkala
2. adanya tujuan atau perasaan dan sikap bersama
3. adanya norma
4. adanya peranan dan status
5. adanya rasa ketergantungan satu sama lain.

Apabila dilihat ciri-ciri kelompok kecil, menurut Hare yang anggotanya 2 sampai 20 orang, tampaknya kelompok peternak sapi di Desa Tulikup, Gianyar termasuk kategori kelompok kecil. Oleh karena keanggotaan kelompok peternak sapi ada yang jumlahnya berkisar antara 15 sampai 25 orang, yaitu enam kelompok peternak sapi model *parsial* beranggotakan 15 orang serta satu kelompok peternak sapi *model koloni* beranggotakan 25 orang.

Ciri-ciri ataupun karakteristik kelompok sosial tradisional di Bali, seperti halnya *subak* dalam bidang pertanian, mempunyai nilai tradisional. Dengan demikian, maka tidak dapat dipungkiri bahwasanya nilai tradisional tersebut merupakan kelanjutan dari budaya bertani masyarakat pada masa Bali Kuno. Oleh karena pada masa Bali kuno dapat dikatakan bahwa pengelolaan pertanian cukup intensif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembuatan saluran irigasi, pengaturan air, penggunaan bajak, dan perlakuan terhadap tanaman padi tampaknya dilakukan dengan sangat baik (Ardika, 1994: 11).

Dengan bergulirnya lembaga-lembaga tani sosial halnya *subak* yang memp

menghadapi berbagai tantangan. Namun, di sisi lain peranan *subak* dalam pembangunan pertanian di Bali masih tetap penting. Sejalan dengan itu, Suyatna (1982: 98) menyatakan bahwa keberadaan *subak* di Bali, seperti berikut ini.

Semakin baik pengelolaan *subak*, berarti semakin hidup *subak* tersebut sehingga semakin banyak pula ide-ide pembangunan yang dapat masuk ke dalam *subak* untuk dibicarakan maupun diputuskan oleh seluruh anggota *subak*".

Pemaknaan yang terkandung dalam simpulan Suyatna di atas, apabila dikaitkan dengan nilai tradisional yang dimiliki oleh anggota *subak*, bahwa masuknya ide-ide dari luar, yaitu nilai modern tidak ditolak, tetapi perlu dibicarakan dan harus diputuskan oleh seluruh anggota *subak*. Dengan kata lain, anggota *subak* harus mau serta mampu mengakomodasi nilai-nilai yang dibutuhkan melalui proses adaptasi dan konsensus atau musyawarah di antara anggota *subak* dalam mengambil keputusan.

Keberadaan suatu kelompok petani, apabila dilihat dari fungsi sosialnya adalah suatu entitas masyarakat petani. Sejalan dengan itu Murdock (dalam Koentjaraningrat, 1997: 139-140) mengatakan, berikut ini.

" Kelompok kekerabatan dilengkapi pula oleh fungsi-fungsi sosialnya yang dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu (1) fungsi-fungsi korporasi, (2) fungsi-fungsi yang sifatnya kadangkala, dan (3) fungsi-fungsi untuk melambangkan kesatuan adat. Kelompok kekerabatan sebagai kesatuan dalam usaha mata pencaharian hidup juga hanya mungkin apabila kelompok itu kecil, sifatnya ketat, dan fungsi serta hubungan-hubungan antar anggota jelas. Selain fungsi-fungsi yang secara khusus bersifat korporasi, fungsi pada kelompok melambangkan kesatuan adat, masih berwujud penyelenggaraan upacara agama".

Sejalan dengan pendapat Murdock di atas yang membagi fungsi sosial kelompok-kelompok kekerabatan menjadi tiga, maka pada kelompok peternak sapi di Desa Tulikup fungsi korporasi diduga masuk unsur nilai modern. Selanjutnya

fungsi yang sifatnya kadangkala & fungsi yang melambangkan kesatuan adat pada kelompok-kelompok peternak sapi di Desa Tulikup diduga masuk dalam konsepsi unsur nilai tradisional.

Dalam perkembangannya, keberadaan kelompok tani di Bali tidak dapat terhindar dari transformasi, yakni bersinerginya nilai tradisional yang dimiliki oleh kelompok itu dengan nilai pendukung lain seperti halnya kebijakan pembangunan agribisnis yang memerlukan nilai modern.

Dalam rangka mengembangkan serta memaknai nilai-nilai kelompok tani, Tulungen (1992) mengungkapkan hasil penelitiannya pada kelompok tani di Desa Kakaskasen I dan III, Kecamatan Tomohon. Dalam hal ini diuraikan bahwa pada masyarakat Minahasa ada berbagai nilai budaya *mapalus*, yakni menyangkut :

1. nilai tentang besaran kelompok ataupun bagian masyarakat yang dianggap dapat memelihara penyelenggaraan kerja sama *mapalus*;
2. nilai kerja sama yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, solidaritas dan keseimbangan;
3. nilai-nilai kesukarelaan dan keterbukaan anggota *mapalus*;
4. nilai kepemimpinan *mapalus* yang telah mengalami pergeseran, dan
5. nilai-nilai kelenturan dalam fungsi, segi keanggotaan, dan jenis kegiatan.

Nilai kelompok tani yang berkembang di Desa Kakaskasen I & III, Kecamatan Tomohon hasil penelitian Tulungen, diduga berkembang juga pada kelompok tani di Bali, khususnya kelompok peternak sapi di Desa Tulikup.

Masih tetap dalam lingkup penelitian tentang pemberdayaan kelompok tani *subak* dalam perspektif *corporate farming* di Bali, Sudaratmaja (2000: 2-3) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, mengembangkan lapangan pekerjaan di pedesaan, dan meningkatkan pendapatan petani, maka diperlukan konsolidasi pengelolaan usaha tani sehingga memenuhi skala ekonomi. Konsep yang diajukan Departemen Pertanian adalah *corporate strategy* yang diterapkan melalui inovasi kelembagaan corporate

F.

A

farming (Budianto, 2000), dan *corporate farming* diartikan sebagai berikut.

Bentuk kerja sama bidang ekonomi dari sekelompok petani sehampanan dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan usahatani dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efisiensi manajemen pemanfaatan sumberdaya dapat dicapai".

Kajian Sudaratmaja dalam penelitiannya tentang *corporate farming* pada kelompok tani *subak* sejalan dengan hasil penelitian Suyatna menunjukkan, bahwa pada dasarnya kelompok tani *subak* dapat menerima ide-ide atau nilai-nilai modern melalui suatu konsolidasi dengan para anggota kelompok tani *subak*. Hal ini merupakan modal dasar bagi pengembangan kelompok tani baru seperti halnya di Desa Tulikup, dengan berusaha memperjelas sinergi nilai-nilainya di kelompok baru tersebut.

Terkait dengan hasil kajian tentang *corporate farming* pada kelompok tani *subak*, Dewanti Septiana Mudrika (2002) dalam penelitiannya tentang tampilan produksi sapi Bali melalui sistem pemeliharaan kandang kelompok di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB mengemukakan bahwa sistem pemeliharaan kandang kelompok belum dimanfaatkan sebagai usaha bersama (*corporate farming*) secara optimal. Dengan demikian, maka pertambahan berat sapi sebesar 0.23 kg/hari masih bisa ditingkatkan melalui pemberian pakan dengan kualitas yang sesuai, yakni dengan memanfaatkan teknologi pakan ternak yang memadai.

Selanjutnya, perkembangan pertanian di Bali saat ini mengalami berbagai tantangan, sehingga diduga ada kecenderungan mengalami involusi. Berkaitan dengan hal ini Geertz (dalam Poerwanto, 2000: 203) memberikan pengertian seperti berikut ini.

Involusi pertanian adalah terjadinya suatu proses kemerosotan pola kebudayaan sehingga tidak mampu menstabilkan atau mengubahnya dalam pola baru, dan bahkan kemerosotan tadi semakin berkembang menjadi bertambah rumit".

Pandangan C. Geertz tentang perkembangan pertanian, mempunyai indikasi menerpa juga pertanian di Bali saat ini. Namun demikian, ungkapan Geertz tersebut bukan tidak mungkin untuk diatasi. Oleh karena penelitian Ardika juga memberikan gambaran bahwa pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-11 petani Bali telah memiliki keterampilan yang memadai dalam bertani sehingga mampu mengelola pertanian dengan cukup baik, dan ini menunjukkan bahwa nilai tradisional turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan pertanian.

Pembangunan, apabila dilihat dari suatu konsepsi nilai, bahwa nilai yang dibutuhkan atau nilai modern senantiasa mengalami proses perubahan yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan perubahan sebagai pencapaian tujuan kelembagaan atau kelompok, Kamaluddin (2002) mengemukakan seperti berikut ini.

"Pembangunan sebagai proses, pada dasarnya telah menciptakan berbagai perubahan yang tidak diantisipasi secara baik dan tepat, perubahan tersebut telah berinteraksi pula dengan perubahan regional dan global yang berlangsung diluar kendali dan perspektif kita sendiri. Perbedaan dari besaran implikasi dan kecepatan perubahan tersebut seakan-akan semakin menjauh dari kemampuan kita untuk mengendalikannya".

Realitas dari problematik bangsa yang kompleks itu memerlukan simplikasi, antara lain berupa :

Pertama, perlu pemahaman serta pendalaman atas segala kesalahan dan kekurangan selama ini sehingga dapat ditemukan suatu perspektif pemecahannya dalam kemampuan dan kondisi bangsa kita dewasa ini.

Kedua, perlu dilakukan perubahan yang mendasar tentang konsepsi pembangunan yang membawa perubahan dalam strategi, taktik, serta implementasinya di dalam masyarakat. Perubahan ini haruslah disadari sebagai akibat dari berbagai kebijakan yang telah ditempuh, akan tetapi sebagai hasil dari sebuah proses perubahan yang terjadi di luar perspektif kita. Perubahan konsepsi ini mengandung anti mendefinisikan kembali pembangunan dalam

perspektif baru dengan menetapkan sasaran-sasaran, target-target, dan tujuan pembangunan secara baru dan masih relevan dengan aneka permasalahan yang dihadapi dewasa ini.

Ketiga, merumuskan suatu model atau matriks berbagai permasalahan tersebut sebagai *input* (masukan) yang mengalami proses perubahan menjadi *output* (keluaran) dalam dimensi waktu atau tahapan-tahapan perkembangan/kemajuan tertentu. Dalam dunia yang semakin terbuka & ketidakmampuan kita untuk mengelak dari perubahan yang bersifat regional, global, atau mondial itu, menyebabkan model-model itu harus selalu disesuaikan dengan tuntutan yang menjadi fokus budaya (*cultural focus*) dari tren perubahan yang terjadi."

Pandangan Kamaluddin di atas bila dikaitkan dengan proses berkembangnya kelompok-kelompok peternak sapi di Desa Tulikup, yakni diduga dalam mengadaptasi nilai baru yang berorientasi ke masa depan, dan menetapkan atau mengembangkan pencapaian tujuan yang menjanjikan.

Masyarakat tani kita sebagai suatu komunitas memiliki nilai moral dan mental yang luhur. Oleh karena nilai ini merupakan nilai hakiki dan kodrati yang dibawa sejak mereka lahir. Lebih jauh, Aristoteles (dalam Campbell, 1981:67-68) mengatakan seperti berikut ini.

Percaya akan kemampuan manusia untuk menemukan dan lebih memilih kesenangan yang luhur dari kegiatan moral dan mental, melihat pada kehidupan sebuah komunitas yang tersusun baik, yang mengikat manusia untuk memperkembangkan kodrat sejatinya. Oleh karena itu, masyarakat bersifat kodrati bagi manusia karena di dalam manusia ada penyebab-penyebab efisien dari kehidupan sosial, hasrat seksual dan kebutuhan untuk persahabatan, dan juga karena hanya dengan sebuah kelompok sosiallah kodratnya dapat berkembang."

Konsepsi tentang nilai tradisional pada masyarakat tani di Bali diduga telah melandasi pula fungsi sosial dan struktur sosial kelompok-kelompok peternak sapi di Desa Tulikup. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles di atas bahwa nilai hidup yang kodrati itu akan bisa

berkembang hanya dengan sebuah kelompok sosial. Nilai tradisional seperti halnya nilai kekerabatan dan ikatan sosial-religius adalah nilai kodrati atau unsur-unsur nilai dasar yang melekat pada masyarakat tani di Bali. Dalam hal ini diduga bahwa nilai kodrati dimiliki juga oleh kelompok-kelompok peternak sapi di Desa Tulikup.

Kebijakan

Menghadapi tantangan global dampak dari modernisasi upaya membangun sektor pertanian khusus peasantnya dengan berorientasi ke masa depan memerlukan suatu komitmen yang kuat dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tani, dan terformulasi dalam bentuk kebijakan. Dalam konteks ini Saragih (dalam Sularto, 2000: I 54- I 57) mengatakan, **Indonesia** memerlukan strategi pembangunan ekonomi yang mempunyai kemampuan jangkauan pemecahan masalah ekonomi yang luas dan visioner; suatu strategi yang tidak hanya mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga secara simultan mampu menghasilkan devisa yang besar untuk membayar utang, menciptakan lapangan kerja yang akomodatif terhadap keragaman tenaga kerja, memperkuat sistem ketahanan pangan & bisa mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, mewujudkan pemerataan serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Semua hal tersebut di atas dapat terwujud apabila pembangunan agribisnis dapat diterima sebagai strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas yang berkesinambungan, dan mengandalkan kemampuan atau fundamental ekonomi yang kita miliki tidak sulit dicapai ke depan. Sebaliknya, apabila kita harus kembali ke strategi pembangunan ekonomi di era Orde Baru, bahwa tidak ada jaminan pertumbuhan, pemerataan, serta stabilitas yang masih tetap berkesinambungan secara simultan akan tercapai. Pengalaman selama rezim Orde Baru setidaknya-tidaknya telah membuktikan hal itu."

Sejalan dengan pandangan Saragih di atas bahwa perlu memahami pengertian tentang agribisnis itu sendiri. Selanjutnya, menurut Soekartawi (2000:2) pengertian agribisnis adalah seperti berikut ini.

" agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil & pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas".

Berdasarkan pada pengertian tentang agribisnis di atas, maka tahapan membangun kepentingan agribisnis melalui kelompok peternak sapi di Desa Tulikup adalah upaya memproduksi sampai dengan usaha pemasaran langsung hasil komoditas dengan jalan membentuk bursa (peternak langsung menjual di kandangnya). Disamping itu, sejalan dengan membangun agribisnis yang membumi, seperti halnya kisah suksesnya Bob Sadino, ada beberapa unsur atau nilai yang harus ditaati. Dalam hal ini Sadjad (2001: 14) mengatakan sebagai berikut.

"Agribisnis memang mengandung unsur-unsur yang dapat dikatakan 'extremely' tradisional primitif maupun yang rasional modern. Tani yang hitungan waktu bisnis-nya didasarkan musim harus dihadapkan pada proses manufaktur dan pelayanan pasar yang sangat didasarkan pada hitungan jam atau eternal. Manajemen yang bersifat seperti serba "easy going" dihadapkan kepada manajemen yang bersifat "taat waktu".

Pandangan Sadjad di atas apabila dikaitkan dengan keberadaan kelompok peternak sapi di Desa Tulikup, maka mengakomodasi kepentingan agribisnis ke dalam kelompok harus dilandasi nilai kedisiplinan, teknologi, diversifikasi, serta berorientasi pada pangsa pasar. Terkait dengan penelitian ini, maka beberapa pandangan, pemahaman, kajian, dan hasil penelitian di atas secara komprehensif sangat bermanfaat dalam mengkaji empat permasalahan pokok, yakni berikut ini.

- I. Proses berkembangnya kelompok para peternak sapi, baik kelompok peternak sapi model koloni maupun model parsial di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar.
2. Keberadaan nilai tradisional dan modern pada kelompok-kelompok peternak sapi serta keberhasilannya.
3. Perbedaan keberhasilan kelompok serta perbedaan keberadaan nilai tradisional

dengan nilai-nilai modern pada kelompok peternak tersebut.

4. Sinergi antara nilai-nilai tradisional dengan modern yang mempengaruhi keberhasilan kelompok-kelompok peternak sapi di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar.

Implementasi

Sejalan dengan itu, Bungaran Saragih (dalam Sularto, 2000 : 157) mendefinisikan agribisnis sebagai berikut ini.

" *The sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies; production on the farm; and the storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them*" (Davis and Goldberg, 1957)."

Pandangan Saragih di atas, apabila dikaitkan dengan perkembangan kelompok-kelompok peternak sapi yang ada di Desa Tulikup diperlukan pemahaman tentang kelompok-kelompok peternak sapi tersebut yang belum mampu memenuhi kepentingan agribisnis secara utuh, yaitu dari hulu hingga hilir. Untuk memahami budaya agribisnis sebagai suatu sistem nilai (nilai modern) pada kelompok-kelompok peternak sapi di Desa Tulikup perlu memahami karakteristik para anggota kelompok pendukungnya. Dalam hal ini Mardimin (1994: 61) mengatakan bahwa ada dua karakteristik masyarakat tani, yaitu karakteristik masyarakat agraris, dan masyarakat modern. Adapun ciri-ciri/karakteristik dari masyarakat agraris yakni seperti berikut ini.

- I. Terikat pada kuatnya norma dalam sistem kekerabatan.
2. Hidup dalam dunia yang tertutup, bergantung diri pada nasib.
3. Takut/khawatir akan masuknya hal baru.
4. Alam dipandang sebagai hal yang dasyat dan manusia tunduk padanya.
5. Hidup berorientasi pada masa lalu.
6. Gaya hidup pasif dan fatalistic.
7. Mobilitas masyarakat rendah.

Pada sisi lain, ciri-ciri atau karakteristik masyarakat modern adalah sebagai berikut :

1. mengendurnya norma dalam sistem kekerabatan
2. pola kehidupan lebih terbuka, nasib dapat diubah.
3. hal-hal baru dipandang sebagai sesuatu yang menantang.
4. alam dipandang sebagai hal yang perlu dikuasai.
5. hidup berorientasi pada masa kini dan masa depan.
6. biaya hidup aktif dan inovatif.
7. mobilitas masyarakat tinggi.

Dari uraian Mardimin di atas tentang ciri-ciri atau karakteristik masyarakat agraris dan masyarakat modern, pengembangan budaya agribisnis pada masyarakat di Desa Tulikup diduga cukup berpeluang, tetapi tak terlepas dari perilaku yang rasional & kemandirian masyarakat didalam mengakomodasi nilai modern dimaksud. Pemberdayaan sektor pertanian dewasa ini tidak akan terlepas dari ketersediaan pasar dan inovasi para anggota kelompok tani didalam mengembangkan komoditas unggulan yang akan diproduksi. Pertanian dengan sistem agribisnis berbasis pada pasar, yakni meliputi kegiatan usaha hulu atau kegiatan usaha yang menghasilkan prasarana/sarana pertanian maupun kegiatan usaha yang memproses hasil-hasil pertanian. Selanjutnya aktivitas pertanian adalah kegiatan farmer yang menghasilkan produksi dan memerlukan suatu proses yang lebih lanjut. Transformasi yang dilakukan pada sektor pertanian memerlukan upaya-upaya guna memformulasikan konsep-konsep baru, yakni dengan komitmen kuat untuk diimplementasikan dalam mengelolanya dari hulu hingga hilir.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka konsep kebijakan pembangunan agribisnis adalah suatu usaha pemberdayaan sektor pertanian dari hulu hingga hilir melalui proses akulturasi nilai secara sinergis, terpadu, dan berkelanjutan, terutama dalam membangun pertanian berorientasi ke masa depan. Upaya memberdayakan sektor pertanian di Gianyar melalui kebijakan pembangunan agribisnis sebagai penyeimbang pembangunan sektor-sektor lainnya diduga memerlukan langkah kebijakan yang terpadu, berkesinambungan & berorientasi ke masa depan.

Suatu kebijakan pemerintah bila tidak diformulasikan secara terstruktur dalam implementasinya akan menuai atau menghadapi berbagai kendala, dan pada akhirnya menjauhkan tujuan dari kebijakan tersebut. Sementara itu, Sajogyo dalam Husken (1997: 53) mengemukakan bahwa kebijakan modernisasi sektor pertanian di Indonesia, tengah mencari jalan mengubah petani-petani gaya lama (peasant) menjadi petani-petani gaya baru (farmer), dan memodernisasi pertanian gaya lama untuk memenuhi industrialisasi ekonomi nasional dalam rentang waktu dari tahun 1970-2020.

Terkait dengan implementasi dari suatu kebijakan Dewa Ngurah Suprpta (2005: 66) mengungkapkan agar pertanian bisa maju, petani sejahtera dan profesi petani dihargai secara proporsional, maka mau tidak harus dimulai dari pendidikan, dan dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya pendidikan dimaksud adalah pemahaman tentang kewirausahaan atau membawa nilai-nilai wirausaha pada aktivitas peasant untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dari beberapa pendapat tentang implementasi kebijakan pemerintah yang paling aktual dihadapi peasant akhir-akhir ini adalah kebijakan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah seperti tertuang dalam Impres No.I tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Ternyata tata perdagangan beras di Tanah Air belum berubah, karena hingga kini bahwa pedagang masih menguasai matarantai beras. Ketika pihak pemerintah menetapkan HPP gabah dan beras, pihak yang diuntungkan oleh kebijakannya itu adalah para pedagang bukan *peasant*. Karena itu agar suatu implementasi kebijakan pemerintah bidang pertanian tepat pada sasaran serta manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh peasant, perlunya memformulasikan suatu kebijakan secara terstruktur, terpadu, serta memberikan outcome kepada para *peasant*.

Simpulan

Kemeranaan bukanlah suatu kepasrahan, serta kemeranaan hendaknya dijadikan titik kulminasi untuk suatu kebangkitan, dan nilai-nilai kebangkitan ini dapat terbangun sebagai suatu

perilaku adaptif dari peasant. Membangun entrepreneurship/kewirausahaan peasant dalam kekinian adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan bila peasant tidak ingin senantiasa masuk dalam katagori masyarakat yang termarginalisasi dalam kancah kemiskinan, maka mau tidak mau harus terbangun jiwa wirausahaannya, sebab jiwa wirausaha dalam bertani adalah identik dengan paradigma baru pembangunan pertanian, atau pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis.

Upaya peasant memaknai faktor produksi secara tepat guna dan berorientasi ke masa depan, membawa pola pikir peasant pada ranah agribisnis yang berkelanjutan dengan input luar rendah.

DAFTAR PUSTKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Persada Graha Ilmu.
- Arifin, Bustanul. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Dillon, H.S. (1999). *Pertanian Membangun Bangsa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Reijntjes, Coen (dkk). (1992). *Pertanian Masa Depan (Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Salikin, Karwan A. (2003). *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogya: Penerbit Kanisius.
- Saragih, Bungaran. (2001). *Suara Dari Bogor (Membangun Sistem Agribisnis)*. Bogor: Sucofindo.
- Sedhawa, Ida Bagus. (2006). *Sinergi Nilai radisional dan Nilai Modern Sebagai Faktor Determinan Keberhasilan Usaha kelompok Peternak Sapi di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar*. Disertasi Pada Kajian Budaya U NU D.
- Soekartawi. (1999). *Agribisnis (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjito S. (1991). *Transformasi Sosial (Menuju Masyarakat Industri)*. Yogya: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Sutanto, Adi. (2003), *Peasant Economics (Petani Gurem: Rumahtangga Usaha Tani dan Pembangunan Pertanian)*. Malang: Bayu Media.
- Suprpta, Dewa Ngurah. (2005). *Pertanian Bali Dipuja Petaniku Merana*. Denpasar: Taru Lestari Foundation.
- Syafa'at, Nizwar, dkk. (2005). *Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional (Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan)*. Yogya : Pustaka Utama.
- Windia, Wayan. (2006). *Transformasi Sistem Irigasi Subak (Yang Berlandaskan Konsep Tri Nita Kama)*. Denpasar: PT. Offset Bali Post.

